

BAB II

TUJUAN TIONGKOK DAN ALTERNATIF STRATEGI YANG DI JALANKAN

2.1 GOALS AND OBJECTIVES

Pada 2005 Tiongkok menyiarkan undang-undang anti pemisahan yang disahkan oleh konferensi ke tiga yang dilakukan oleh kongres rakyat nasional Tiongkok. Undang-undang tersebut ditekankan Tiongkok dapat melakukan tindakan militer apabila gerakan Taiwan berusaha lebih keras dalam melakukan usaha kemerdekaan (Okano-Heijmans, Wit, & Paul Van Der Putten, 2015). Pada kurun waktu 2005-2010 pada saat konflik bersenjata antar keduanya terdapat 3,5 juta tentara yang disiapkan oleh Tiongkok dan sudah mengirim rudal ke perairan Taiwan. Dalam masalah ini kurang lebih Amerika Serikat ikut turun tangan sebagai aliansi setia Taiwan (Samosir Azarya, 2015).

Sedangkan dalam sisi yang berbeda Tiongkok melihat peluang lain dari masalah tersebut yaitu dalam kerja sama ekonomi, cara tersebut dianggap sebagai langkah mencapai penyatuan secara damai. Salah satu kerja sama yang dirancang sebelum 2010 adalah ECFA yang diharapkan Tiongkok sebagai wadah komunikasi yang intensif yang secara tidak langsung meredakan ketegangan politik antar keduanya. Dalam kerja sama ekonomi keberkelanjutan tersebut terjalin sampai dengan sekarang yang diperkirakan pada masa presiden Ma Ying-Jeou berpeluang membuka 273.000 lapangan pekerjaan (Amdjad, 2014).

Usaha Tiongkok dalam mendorong tercapainya prinsip satu Tiongkok, Mengacu pada *Rational actors* dalam tulisan Allison, dalam analisis *Goals and Objectives* hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah tujuan nasional suatu negara, keuntungan, kegunaan dan preferensi dari hal tersebut (Alisson, 1969). Maka dari itu dalam penelitian ini akan dipaparkan terlebih dahulu *Goals* dan *Objectives* Tiongkok:

A. GOALS

2.1.1 Prinsip Satu Tiongkok

Masalah Taiwan dan Tiongkok dalam penyatuan wilayahnya dengan Taiwan adalah trauma bangsa China yang harus disembuhkan. Maka dari itu reunifikasi juga merupakan bagian dari prinsip satu Tiongkok (Chung T. N., 2019). Hu mengatakan dalam salah satu pidatonya (Hsiao, 2009) :

"The DPP must accept the principle of "One China" and "change" its pro-independence attitude, demand that a political party must first abandon its main principles as a precondition for interaction is not in accord with democratic principles"

Sebelumnya *White paper "China's Peaceful Development 2011"* kebijakan *"Core Interests"* meliputi enam aspek 1) kedaulatan negara, 2) keamanan nasional, 3) integritas teritorial, 4) reunifikasi nasional, 5) sistem politik Tiongkok yang dibangun atas konstitusi dan kestabilan sosial secara menyeluruh dan 6) perlindungan dasar untuk pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan

(Zhaokui, 2014). “*China’s Core Interests*“ dikatakan mencakup tiga fokus utama kedaulatan nasional, keamanan nasional dan integritas teritorial. Maka dari itu dalam poin integritas teritorial prinsip satu Tiongkok adalah salah satu tujuan utamanya. Maka dari itu masalah Taiwan secara tidak langsung dapat dikatakan masuk kedalam kepentingan nasional pemerintah Tiongkok juga mengatakan jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaanya maka pemerintahnya akan menyerang (Pilling, 2011).

Inti dari prinsip satu Tiongkok adalah untuk lebih menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, serta bermasuk untuk penyatuan kedua wilayah. Sekaligus sebagai alat diplomasi kepada negara lain agar tidak mengakui Taiwan sebagai suatu entitas yang berdaulat, saat ini hanya terdapat 23 negara yang mengakui wilayah tersebut (Aziz, 2015). Sebelumnya pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping dan Jiang Zemin menganggap masalah Taiwan merupakan masalah sekunder, namun setelahnya masalah ini lebih kepada masalah Nasionalitas yang disebut sebagai *China’s Dream*. Sehingga secara simbolik pengembalian wilayah Taiwan pada Tiongkok menjadi sangat penting sebagai awal dari kebangkitan masyarakat Tiongkok secara menyeluruh dibawah kepemimpinan Hu (Funnell, 2018).

Dengan terwujudnya prinsip tersebut, Tiongkok melihat bersama dengan Taiwan maka akan membangun transisi politik, sosial dan ekonomi yang sangat pesat yang disebut sebagai peremajaan bangsa China. Bahkan Tiongkok dalam *White Paper 2010* mengatakan “*the two sides of the Taiwan Strait are destined to ultimate reunification in the course of the great rejuvenation of the Chinese*

nation” (Ministry of National Defence, 2017). Tiongkok merasa tiga komponen diatas tidak akan dicapai tanpa Taiwan. Selain itu negara tersebut merasa tidak menyatukan wilayahnya merupakan penghinaan atas wilayah yang dianggap separatis yang berhasil merdeka dan ini adalah masalah berabad lalu dimulai dari perang candu yang harus diselesaikan (S.Glaser, 2017).

Selain itu penyatuan dengan prinsip satu Tiongkok dilatar belakangi oleh pandangan Tiongkok yaitu Taiwan adalah kapal induk yang tidak dapat tenggelam, jika Tiongkok mendapatkan wilayah tersebut tujuan Amerika Serikat atau Jepang akan berhasil yang dipandang Tiongkok ingin menjadikan wilayah Taiwan sebagai sarana militer untuk menyerang negaranya. Bagi Tiongkok Taiwan adalah tembok kekuatan pertama bagi pertahanan negaranya. Taiwan dirasa cukup strategis sebagai wadah negara lain untuk membangun kekuatan militer yang diprediksikan akan dapat memanipulasi Tiongkok (Marschik, 2018).

Selain itu wilayah Taiwan merupakan pusat jalur pelayaran Pasifik barat sekaligus sebagai basis militer yang strategis (Puspitosari, 2016). Hal ini membuat AS sebagai negara yang menginginkan kekuasaan tentu saja tidak rela apabila wilayah Taiwan diserahkan begitu saja pada lawannya di Asia Timur yaitu Tiongkok. AS memasukan Asia Timur sebagai wilayah untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi dan diplomasi yang tertuang dalam *East Asia Strategic Initiative* (EASI) salah satunya ingin mencegah munculnya hegemoni di Asia Timur, mempercepat orientasi barat di wilayah tersebut dan mengembangkan demokrasi. Sehingga Tiongkok dalam posisi ini tidak ingin kehilangan wilayah

strategis seperti Taiwan dan tidak ingin AS terus menjadi hegemoni di Asia, serta termasuk terus menyuarkan demokrasi (Erwinsyah, 2011).

2.1.2 Mengembangkan ekonomi Tiongkok

Hu Jintao Mengatakan pada salah satu pidatonya (Shulong, 2013) :

“Maintaining the one China framework would be beneficial to enhance the mutual political trust, to the stability and development of cross-strait relations, to achieve breakthroughs, including substantial progress in exchanges in the fields of industry and economic”

Dalam sudut pandang Tiongkok wilayah Taiwan ditempati oleh pelabuhan-pelabuhan utama. Sehingga siapapun yang berkuasa atas Taiwan dapat menggunakan hal tersebut untuk mengganggu keamanan impor energi maritim negaranya. Dalam melintasi pelabuhan tersebut Tiongkok bergantung pada 86 persen minyak serta lebih dari 50 persen gas alam (Marschik, 2018).

Secara ekonomi Tiongkok menganggap Taiwan sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang baik di Asia. Di mana wilayah tersebut dilihat memiliki potensi ekonomi yang besar yang dapat dikembangkan Tiongkok. Seperti dalam perdagangan dan sektor industri yang mumpuni dikarenakan Taiwan memiliki SDA yang baik, sehingga dapat mengembangkan wilayahnya. Maka dari itu Tiongkok merasa bergabungnya Taiwan dengan negaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam negeri (Dewi & Dewi, 2019). Salah satu contoh potensi wilayah Taiwan adalah dengan adanya *Taiwan*

Semikondktor Manufacturing Coporation (TSMC) yang menguasai pasar semikonduktor dunia, dalam hal ini Taiwan memiliki teknologi yang bagus serta penguasaan pasar yang baik (Tucker, 2005).

Dari kedua *Goals* Tiongkok diatas kita dapat memahami bahwa tujuan utama Tiongkok dalam masalah ini adalah adanya menyatuan atau tercapainya Prinsip Satu Tiongkok, yang merupakan tujuan nasional dari negara tersebut. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kepentingan yang lain yaitu ekonomi yang menjadi tujuan lain dari Tiongkok mengingat adanya kepentingan peremajaan negaranya di mana Taiwan harus diikuti sertakan karena merupakan komponen yang penting dalam transisi wilayah tersebut. *Goals* oleh Tiongkok inilah yang dirasa menjadi dasar terbentuknya kebijakan-kebijakan negaranya terhadap Taiwan dan konflik penyatuan.

B. OBJECTIVES

2.1.3 Mempertahankan status quo

Terdapat sebuah konsensus yang bernama konsensus 1992 yang dibentuk oleh Tiongkok dan Taiwan untuk berkaitan antara satu sama lain, dalam kerangka prinsip satu Tiongkok walaupun dalam interpretasi yang beda antara kedua. Konsensus ini juga dapat disebut sebagai status quo, namun Taiwan pernah menolak untuk mengakui hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh An fengshan yang merupakan juru bicara Taiwan di Beijing (C.Hernandez, 2016).

“The cross-strait communication mechanism has been suspended because Taiwan did not recognize the 1992 Consensus, the political basis for the One China principle”

Adapun respon untuk mempertahankan status quo oleh pemerintah Tiongkok yaitu disampaikan oleh presiden Hu Jintao (Shulong, 2013) :

“Although the mainland and Taiwan are yet to be reunified, the fact that both belong to one China has never changed. China's territory and sovereignty have always been indivisible and no division will be tolerated. The two sides of the Taiwan Straits should uphold the common stand of opposing Taiwan independence and of following the ‘1992 Consensus’. Both sides should increase their common commitment to upholding the one-China framework and, on this basis, expand common ground and set aside differences. We are ready to conduct exchanges, dialogue and cooperation with any political party in Taiwan as long as it does not seek Taiwan independence and recognizes the one-China principle.”

Dalam masalah hubungan lintas selat Tiongkok sangat berfokus pada hubungan bilateral. Hal ini tetap diarahkan dengan menggunakan prinsip satu Tiongkok, pemerintah ingin menegaskan bahwa harus ada penyelesaian masalah dengan pendekatan privat ke swasta, industri dan perusahaan. Tiongkok menegaskan bahwa dengan adanya hubungan lintas selat secara ekonomi maka yang pertama dicapai adalah menghalangi Taiwan untuk merdeka. Maka dari itu untuk hubungan selat antara keduanya sangat membutuhkan dan menegaskan konsensus 1992 oleh Tiongkok (Tung, 2004).

Tiongkok memiliki tujuan untuk meredam status *De Jure* dari Taiwan serta mempromosikan reunifikasi yang mengarahkan Taiwan untuk kembali dalam penyatuan wilayah yang dipandang pada masa Hu sebagai *China's Dream*. Kemudian menyatakan bahwa hubungan lintas selat dipererat untuk mempertahankan konsensus 1992 agar Taiwan terus terhubung dengan Tiongkok walaupun dalam bentuk Status quo. Konsensus 1992 merupakan hasil pertemuan dari *Srait Exchange Foundation* (SEF) sebagai perwakilan Tiongkok dan *Association for Relation Accros The Taiwan Strait* (ARATS) sebagai perwakilan Taiwan. Hasil konsensus tersebut adalah kedua wilayah mengakui adanya prinsip satu Tiongkok. Walaupun memiliki definisi yang berbeda serta kebijakan antar selat yang berlandaskan pada konsensus 92 (UMM, 2017).

Saat ini Tiongkok masih mempertahankan status quo atas kebijakannya terhadap Taiwan, walaupun status quo bagi Tiongkok merupakan pengabdian masalah dengan Taiwan dan statusnya, namun pada akhirnya mulai terdapat langkah untuk penyatuan kembali (Consulate General of The People Republic of China in Houston, 2004). Maka dari itu pada 2005 ketua CPPCC Jiaqing Lin berpidato dan mengungkapkan saat ini negaranya mulai melihat bahwa masalah Taiwan akan diselesaikan dalam pandangan baru yaitu menahan kemerdekaan Taiwan serta mempromosikan penyatuan wilayah. Dengan menghalangi semua usaha Taiwan dalam kemerdekaan dan terus menarik masyarakat Taiwan untuk tujuan akhir Tiongkok yaitu prinsip satu Tiongkok (Jianwei, Hu Jintao's " New Thingking " on Cross-Strait Relations, 2007).

Pada 6 Januari 2006 juru bicara kantor urusan Taiwan Li Weiyi pernah menyatakan dalam sebuah konferensi bahwa pemerintah Taiwan menginginkan adanya reformasi konstitusional karena ingin memperjuangkan kemerdekaan (Mainland Affairs Council, 2006). Pemerintah Taiwan mencoba mengubah status quo, bahkan pada masa pemerintahan Chen sama sekali tidak ingin mengakui konsensus 1992. Kemudian membuat Tiongkok melihat bahwa status quo lebih baik dari kemerdekaan Taiwan dan lebih baik dari tidak sama sekali (Gov.cn, 2006).

Salah satu usaha Tiongkok adalah mulai bergerak ke arah penggunaan hukum dengan penegasan kembali *Anticession* pada 2005 lalu yang mengarahkan pada adanya Unifikasi. Tiongkok melihat usaha Taiwan agar tidak pada status quo adalah suatu kemunduran yang membuat Tiongkok berpandangan lebih baik status quo yang bukan merupakan status *de jure* dari Taiwan. Sehingga status quo tersebut diimplementasikan dalam kerja sama antar selat dan untuk mengkomunikasikan prinsip satu Tiongkok (Gov.cn, 2006).

Tiongkok melihat bahwa saat ini partisipasi internasional Taiwan semakin menguat dan dilihat sebagai salah satu strategi untuk mempromosikan kemerdekaannya dan pasca kekuasaan Lee Teng Hui dan pemerintahan Chen Shui Bian mendukung gerakan kemerdekaan Taiwan dengan memperluas kerja sama di ranah internasional untuk terus mempromosikan kemerdekaan. Tiongkok beranggapan Taiwan berusaha menciptakan dua negara China, terlebih Taiwan melakukan hubungan resmi dengan 23 negara serta membangun kantor bisnis dan komersial besar di 120 negara. Taiwan bermaksud untuk meningkatkan kantor

perwakilan menjadi fungsi yang lebih meningkat yaitu kantor kedutaan atau konsultan, Tiongkok melihat semakin sering dan banyaknya Taiwan melakukan kerja sama maka akan semakin besar kemungkinan wilayah tersebut merdeka (Sun, 2012).

Tabel 2.1 Keikut Sertaan Taiwan di Ranah Internasional 2002-2008

Tahun	Mitra kerja sama
2002	WTO
2004	PANAMA
2005	GUATEMALA
2008	NIKARAGUA EL SALVADOR HONDURAS

Tabel. 2.1 (Okano-Heijmans, Wit, & Paul Van Der Putten, 2015)

Tiongkok berusaha menghalangi Taiwan bernegosiasi dengan negara yang berkerja sama dengan wilayahnya. Sehingga Tiongkok melihat dengan adanya status quo sekiranya dapat mempertahankan status Taiwan yang terus terikat kepada Tiongkok.

Hubungan ekonomi Tiongkok atas Taiwan dapat diartikan sebagai bentuk meredam pertikaian antar wilayah serta sebagai bentuk komunikasi. Pada pertemuan ARATS dan SEF Tiongkok tetap menegaskan bahwa dalam hubungan ekonomi, prinsip satu China tetap menjadi yang utama ketika kedua negara membahas kerja sama antar wilayah, maka tidak bisa dipungkiri Tiongkok menginginkan integrasi ekonomi sebagai pemersatu (L.Hsieh, 2009). Bahkan jauh

setelah masa pemerintahan Hu Jintao pemimpin setelahnya yaitu Xi Jinping menjamin akan menyatukan Taiwan dalam kurun waktu 2049 dan sementara dengan status quo, partai komunis Tiongkok merasa mereka dapat menyatukan Taiwan melihat kebangkitan ekonomi negaranya. Terutama Tiongkok melihat dari adanya hubungan antar selat menjadikan yang tidak dapat dinegosiasikan menjadi dapat dibicarakan kembali, representasinya adalah perbaikan hubungan lintas selat merupakan bentuk damai untuk penyatuan dalam bidang ekonomi (Plerre, 2016).

2.1.4 Mendapatkan kepercayaan masyarakat Taiwan

Dalam hal ini Tiongkok memiliki kebijakan khusus yang disebut dengan *“three middles and the youth”* pemerintah Tiongkok mengatakan yang dituju dalam program ini adalah (Ya-Wei, 2017):

“residents of central and southern Taiwan, middle- and low-income families and small- and medium-sized enterprises “

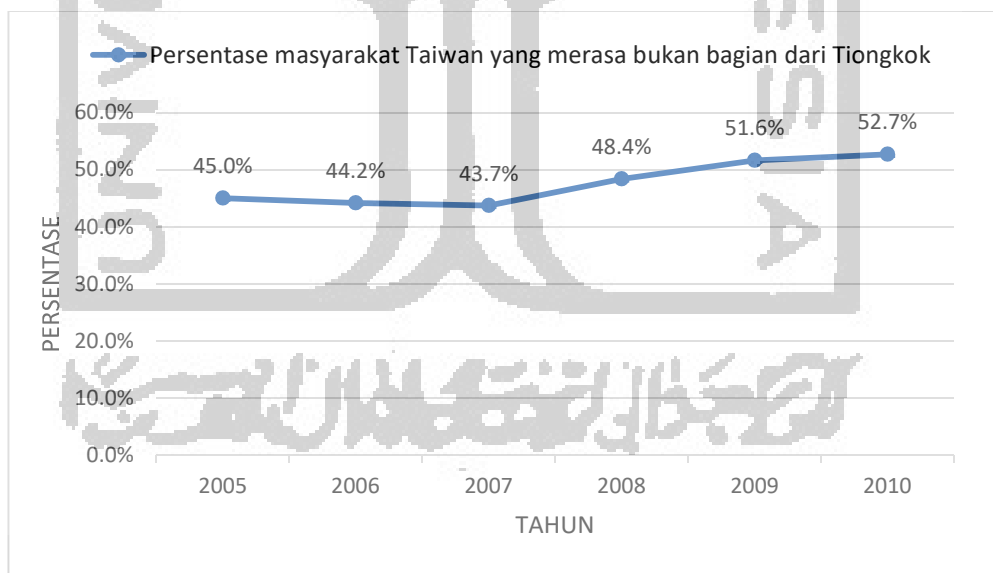
Istilah *“Tree middles and the youth“* pernah diubah pada 2015 menjadi *“the young generation and the grassroots stratum “* namun tidak dijelaskan secara jelas oleh pemerintah Tiongkok mengapa terjadi perubahan nama untuk kebijakan tersebut. Namun kebijakan ini dibentuk oleh dorongan penyediaan pertukaran antar selat. Kebijakan ini baru benar-benar diresmikan oleh ketua konferensi konsultatif politik rakyat Tiongkok Yu Zhengsheng pada maret 2017 lalu namun tahun sebelumnya telah diimplementasikan (Ya-Wei, 2017). Selain itu pemerintah mengatakan tujuan dari kebijakan ini untuk menghilangkan kesalah pahaman didalam diri masyarakat Taiwan dan menumbuhkan citra baik untuk pemersatuan. Adapaun kebijakan yang dikeluarkan adalah (Yao, 2017) :

1. Dana USD 5,73 juta untuk meningkatkan program pertukaran dalam menarik minat partisipasi masyarakat Taiwan untuk berinteksi dan mendapatkan pengalaman di Tiongkok.
2. Dibentuk kamp musim panas dan menurunkan standar nilai minimum ujian bagi pelajar Taiwan bila ingin mendaftarkan diri di perguruan tinggi Tiongkok.
3. Membuka 53 pangkalan awal pemuda untuk berkunjung ke Tiongkok dan dapat mengakses dokumen izin perjalanan.
4. Diberikan akses khusus untuk melakukan penelitian ke Tiongkok.

Program diatas menjadi salah satu pendorong pendekatan dengan masyarakat Taiwan, Tiongkok melihat hubungannya dengan Taiwan tidak sebatas hanya pemerintah dengan pemerintah, salah satu titik berat dari hal ini adalah masyarakat sebagai pemegang kuasa penggerak pemerintah. Yang kemudian menjadikan solusi dengan menggunakan militer dianggap tidak relevan lagi dan kurang bermanfaat. Sehingga dibutuhkan diplomasi yang bisa menegosiasikan hubungan keduanya (Prayogi, 2014). Penyelesaian masalah kedua wilayah ini ingin diarahkan Tiongkok pada diplomasi yang *soft*. Pemerintah negara ini berusaha untuk memunculkan pandangan bahwa mereka adalah pemerintah yang ramah dan bertoleransi, pandangan semacam ini penting dalam mendorong masyarakat Taiwan untuk lebih pro terhadap pemerintahnya, karena tujuan akhir dari masalah ini adalah Tiongkok ingin menyatukan negaranya secara damai pasca konflik militer (Ying C. , 2019).

Tiongkok melihat bahwa hubungan pemerintahnya dengan pemerintah Taiwan dalam sebuah kerja sama ekonomi merupakan pertukaran antar selat yang kemudian mengarahkan masyarakat Taiwan untuk menginginkan Tiongkok sebagai penyatuan di masa depan. Seperti yang dikatakan Zhu Weidong seorang peneliti dari *Institute of Taiwan Studies Chinese Academy of Social and sciences* bahwa “adanya sebuah pertukaran kunjungan membawa kedua publik di kedua wilayah lebih dekat dan saling mempromosikan pengetahuan, pemahaman dan akomodasi serta meningkatkan rasa saling percaya“ Semakin erat hubungan antar selat maka akan semakin besar peluang padangan positif masyarakat Taiwan terhadap Tiongkok (Weidong, 2000).

Grafik 2.1 Jumlah Masyarakat Taiwan Yang Merasa Memiliki Indentitas Sendiri Dan Bukan Bagian Dari Tiongkok Tahun 2005-2010



Sumber : (Albert, China Taiwan Relations, 2018)

Selain itu terdapat pandangan lain dari data diatas kita dapat melihat bahwa ada peningkatan dari masyarakat Taiwan yang merasa mereka bukan bagian dari Tiongkok sebanyak 45 persen pada 2005 meningkat pada 2010 menjadi 52,7 persen, masyarakat ini merasa mereka memiliki identitas yang berbeda yaitu dari aspek demokrasi yang sangat ingin dikembangkan walaupun masyarakat Taiwan menggunakan bahasa mandarin sebagai bahasa ibu namun banyak orang Taiwan merasa mereka memiliki hak untuk melanjutkan kehidupan terpisah (Albert, 2018). Menguatnya identitas Taiwan ini dikarenakan penggunaan kekuatan militer yang sebelumnya digunakan Tiongkok yang kemudian menimbulkan respon domestik masyarakat yang akhirnya membuat dukungan untuk demokratisasi semakin meningkat (Hengjun, 2016).

Demokrasi di Taiwan semakin lama semakin berkembang sehingga banyak masyarakat Taiwan merasa terintimidasi dengan adanya Tiongkok. Masyarakatnya cenderung tidak ingin memiliki sistem yang sama dengan pembatasan untuk menyuarakan pendapat dan ada tekanan pemerintah yang kuat didalamnya. Sehingga masyarakat sangat sulit menerima sistem otoriter Tiongkok. Terdapat perbedaan politik yang signifikan antara keduanya menjadikan posisi suara masyarakat Taiwan ingin mandiri dan memisahkan wilayahnya secara resmi (Dewi & Dewi, 2019).

Tiongkok juga ingin kembali membentuk kepercayaan masyarakat Taiwan semenjak memburuknya Hong-kong yang diambil alih oleh Tiongkok. Memunculkan pandangan bahwa suatu wilayah tidak akan baik-baik saja dibawah kepemimpinan negara otoriter dan prinsip satu negara dua sistem dianggap

sebagai perampasan demokrasi (Yao, 2017). Tiongkok mencoba memenangkan hati masyarakat Taiwan disebabkan sulitnya dalam meraih prinsip satu Tiongkok di tengah-tengah masyarakat Taiwan saat ini, Tiongkok saat ini mencoba untuk mengubah pandangan seperti meningkatkan layanan kesehatan, pertanian, pariwisata dan juga pendidikan bagi masyarakat Taiwan yang tinggal di negaranya (Ying Z. , 2009).

Dari data diatas terkait dengan *Objectives* Tiongkok kita dapat memerhatikan bahwa langkah dalam pencapaian *Goals* tidak terlepas dari aspek mempertahankan status quo sebagai langkah yang penting dalam mempertahankan status Taiwan. Selain itu Tiongkok juga menyadari bahwa kepercayaan dan suara masyarakat Taiwan tidak dapat diabaikan dan menjadi salah satu yang penting dalam mencapai tujuan nasionalnya karena dirasa dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah wilayahnya.

2.2 ALTERNATIVES

Menurut Allison, setiap aktor akan memikirkan alternatif yang rasional dalam pemilihan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan nasional negaranya. Hal ini dipilih sesuai dengan kondisi negara tersebut (Allison, 1969). Maka dari itu Tiongkok memiliki beberapa Alternatif dalam isu prinsip satu Tiongkok yaitu tindakan kerja sama ekonomi antar selat dan tindakan militer. Dalam melihat alternatif yang dipilih oleh Tiongkok kita dapat melihat pernyataan dari pemerintah terkait bahwa penyelesaian damai yaitu kerja sama ekonomi dan militer adalah dua kebijakan yang bisa digunakan untuk masalah Taiwan.

Kedua Alternatif diatas sejalan dengan warisan formula ideologis dimana tujuan nasionalis PKC masih dalam ranah yang sama yaitu militer dan ekonomi yang selalu dipentingkan. Ketika Hu Jintao bertemu dengan Jiang Zemin mantan sekretaris jendral partai komunis Tiongkok, ia mengatakan dalam pertemuannya bahwa (Brown, 2004) :

“China should persevere in efforts for peaceful reunification but that it was a major political principle that China should never make a commitment to give up the use of force. “The better we prepare for the military struggle, the more likely we are to gain peaceful reunification in the future”

2.2.1 Melanjutkan Kerja Sama Ekonomi Antar Selat

Dalam menyambut ketua dari partai Kuombintang Taiwan Wu Poh Hsiung yang menandakan atas pencairan masalah setelah bertahun-tahun hubungan yang tidak damai. Dalam pertemuan tersebut presiden Hu Jintao mengatakan (France24, 2008) :

“Chinese and Taiwanese should make sure that their people never take up arms against each other again” setelahnya

Taiwan dan Tiongkok berjanji akan melakukan dialog yang sudah tertunda satu dekade, *“Based on the past exchanges and communications between the two parties, and under the new situation, I hope we can promote cross-strait relations, exchange opinions and look to the future, and push forward*

the peaceful development of cross-strait relations“ lanjut Hu

Jintao

Namun dilain sisi identitas nasionalnTaiwan semakin menguat yang berdampak pada hubungan antar kedua wilayah yang semakin rumit, terutama banyak generasi baru Taiwan telah dibesarkan atas identitas dan pemahaman yang sama didalam negerinya. Tiongkok hadir dengan pendekatan lintas selat sebagai bentuk rekontruksi budaya untuk menarik masyarakat untuk tidak pro-independen. Maka dari itu Tiongkok menutup diplomasi dengan cara radikal dan kekerasan dan mengubah pemikiran “hanya Taiwan dan kemerdekaan Taiwan“ yang kemudian mendorong terbentuknya penyatuan (Chai, 2018).

Namun beberapa tahun kebelakang dikatakan bahwa terdapat pergerakan yang cukup Tinggi oleh masyarakat Taiwan ke Tiongkok. Beberapa alasanya generasi muda Taiwan melihat peluang kerja yang semakin berkurang di wilayahnya. Sehingga pindah dan menetap di Tiongkok menjadi kemungkinan yang baik untuk kelangsungan hidup. Selain itu dari pandangan pengusaha Taiwan Tiongkok adalah wilayah yang menjanjikan untuk mengejar pasar yang lebih kompetitif, dengan alasan lainnya adalah (Arouet, 2015) :

1. Tenaga kerja yang murah
2. Penyediaan lahan yang luas dan mudah diakses
3. Peraturan lingkungan yang lebih sedikit
4. Pinjaman bisnis untuk pengusaha Taiwan

Sebagai gambaran bahwa Tiongkok berusaha menarik masyarakat Taiwan dengan kebijakannya. Pada 2006 sudah dilakukan negosiasi untuk membicarakan peningkatan pertanian antar selat seperti bekerja sama dengan organisasi pertanian Taiwan, dengan menawarkan pembangunan perusahaan di Tiongkok. Serta menawarkan para petani untuk ikut dalam hubungan lintas selat untuk meningkatkan ekonomi atas daya saing yang sulit, bisa dikatakan bahwa kerja sama lintas selat ini kemudian masih dalam ranah perseorangan tidak kemudian secara langsung membawa nama pemerintah Taiwan (Jianwei, Hu Jintao's " New Thingking " on Cross-Strait Relations, 2007).

Target utama suara yang diinginkan Tiongkok adalah KMT, politisi serta pebisnis Taiwan, elit pendidikan intelektual dan pemuda. Salah satu yang mendukung hal ini adalah dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok banyak mengundang pelajar serta politisi Taiwan untuk berkunjung kenegaranya seperti adanya acara pendidikan, budaya, seminar, kegiatan krestifitas serta yang lainnya dalam menarik masyarakat Taiwan terutama penduduk Taiwan yang masih muda. Tiongkok juga mengadakan lomba perancangan bisnis yang dikhususkan untuk pebisnis muda Taiwan dengan hadiah NT 12 juta atau setara dengan USD 397.000 serta membangun 53 pangkalan *Star-up* untuk pemuda Taiwan (Chung L. , 2017).

Dari adanya ketertarikan kepada Tiongkok dan sangat dekat dengan wilayah mereka, masyarakat Taiwan mulai melakukan perpindahan baik tempat tinggal maupun pergerakan investasi. Pada 2014 diperkirakan lebih dari 1 juta masyarakat Taiwan pindah ke Tiongkok dan kira-kira 100.000 pebisnis berinvestasi disana dan 40 persen ekspor Taiwan mengarah ke Tiongkok (Chuang,

2016). Selain itu Tiongkok dirasa menerima hasil dari kebijakannya di beberapa sisi dalam menarik perhatian masyarakat Taiwan seperti 3 juta masyarakat Taiwan yang berkunjung ke Tiongkok setiap tahunnya (Council Taiwan Affairs Office of the State, 2003).

Di lain sisi dalam kaitannya dengan ekonomi pemerintah Taiwan sempat merasa tertekan oleh komunitas pebisnis di dalam negerinya sebab mereka menuntut adanya “*Three Links*” di mana ada penuntutan atas perdagangan, transportasi serta layanan pos yang melintasi selat. Mereka mengeluh akan adanya tambahan waktu dan biaya yang dikeluarkan ketika harus singgah di Hong-kong sebelum adanya transaksi dengan Tiongkok, mereka mengancam pemerintahnya sendiri jika pemerintah tidak membuka hubungan langsung maka mereka akan pindah ke Tiongkok (Council Taiwan Affairs Office of the State, 2003).

Sebelumnya pada 2008 presiden Taiwan Ma Ying Jeou mulai berdialog dengan pemerintah Tiongkok untuk melanjutkan kembali hubungan lintas selat secara ekonomi karena pada saat itu Ma melihat bahwa sudah saatnya membicarakan hubungan ekonomi yang lebih resmi antara pemerintah dengan pemerintah di selat. Pada kenyataan lainnya Ma melihat sudah terjalin hubungan yang erat antara masyarakat Taiwan dengan Tiongkok, seperti warga negara yang bekerja dan tinggal di Tiongkok sejak 2008 sangat meningkat pesat dan 2009 perusahaan-perusahaan Taiwan menginvestasikan USD 150 Miliar dan lebih dari 77.000 projek dalam waktu 20 tahun terakhir. Selain itu pemerintah juga tidak dapat memungkiri kunjungan masyarakatnya ke Tiongkok yang begitu tinggi yang pada 2011 mencapai 3 juta wisatawan (Congressional Research Service , 2015).

Dengan adanya kerja sama atas kepercayaan masyarakat Taiwan terhadap Tiongkok dan perpindahan karena beberapa faktor yang kemudian mendorong kerja sama dalam bidang ekonomi yang lebih jauh lagi antara kedua wilayah, jika dilihat kebelakang hubungan keduanya sudah terjalin secara ekonomi sejak dihentikannya pengiriman rudal Tiongkok ke Taiwan pada tahun 1996 yang pada saat itu membuat hubungan keduanya memburuk. Kemudian jauh mereda kira-kira pada tahun 2000-an. Hubungan keduanya juga jauh membaik secara ekonomi pada skala perdagangan yang diutamakan yaitu jalur laut yang setelahnya mengarah pada jalur darat, namun dikatakan sejarah besar hubungan keduanya berawal pada 2010 dengan adanya tanda tangan perjanjian ekonomi yang lebih damai (Ying C. , 2019). Selain itu terdapat BOAO forum Asia pada april 2009 pada saat itu pemerintah Taiwan bertemu dengan perdana menteri Tiongkok Wen Jiabao dan melakukan tanda-tangan perjanjian ekonomi dengan adanya tambahan transportasi untuk masyarakat di jalur lintas selat dan membentuk kerja sama keuangan (Jianwei, Hu Jintao's " New Thingking " on Cross-Strait Relations, 2007).

Selain itu Tiongkok berdiplomati dengan Perusahaan Taiwan yang dirasa adalah salah satu kekuatan untuk mempromosikan Tiongkok sebagai tempat yang baik kepada masyarakat Taiwan serta penguatan hubungan lintas selat dan reunifikasi kemerdekaan (ANGOP Agencia Angola Press, 2006). Sejak dibukanya perdagangan bebas Taiwan dan Tiongkok pada 2008 hal ini diikuti oleh kesepakatan perdagangan yang lebih besar antar kedua pemerintah seperti 20 penandatanganan kesepakatan perdagangan dan penerbangan Taiwan-Tiongkok

secara langsung, dibukanya perdagangan langsung ini karena Ma Weikuo juru bicara presiden Tiongkok mengatakan itu merupakan hak mereka sebagai wilayah (Yimou Lee, 2014).

Setelah dibukanya ekonomi dari kedua pemerintah, Investor asal Taiwan juga menanam modal di Tiongkok skala yang lebih besar. Maka dari itu untuk keterikatan lebih lanjut antara negaranya dengan pemerintah Taiwan, Tiongkok memberikan kebijakan lain yaitu memberikan *preferential treatment* yaitu *corporate income tax rate* untuk menarik para investor Taiwan. Tiongkok juga memberikan dana pinjaman untuk investor Taiwan yang tersedia di Bank pembangunan Tiongkok dan Bank Huaxia dengan dana yang disediakan yaitu 8 miliar yuan atau sekitar USD 1 miliar dan adanya penyediaan lahan murah bagi perusahaan yang ingin mendirikan perusahaannya di Tiongkok (Mahadeli, 2008).

Kerjasama ekonomi antar selat ini sudah dilakukan sejak 2006 lalu yaitu dengan menegosiasikannya dalam bentuk ekonomi yang pada saat itu didukung oleh partai Kuomintang dengan menawarkan 15 pilihan kerjasama ekonomi yang sebelas diantaranya berkaitan dengan pertanian. Tiongkok juga menyatakan bersedia mengakui ijazah dari masyarakat Taiwan yang secara ekonomi mereka akan diterima jika ingin bekerja di Tiongkok dan diberikan lisensi media bagi yang ingin bekerja dirumah sakit. Sejauh ini Tiongkok telah memberikan akses pasar kepada 22 kategori buah petani Taiwan dan pada 11 aspek sayuran yang diatur tarifnya bahkan sampai nol persen. Hal ini membuat banyak masyarakat Taiwan sulit untuk menolak kerjasama dengan Tiongkok karena sangat menguntungkan (Jianwei, 2007).

Pemerintah Tiongkok bertujuan ingin membuat Taiwan bergantung pada negaranya seperti Tiongkok bersedia menerima kerugian yang cukup besar seperti menawarkan investor Taiwan dalam pemberlakuan pajak dan defisit Tiongkok atas Taiwan mencapai USD 20 miliar setiap tahunnya hanya untuk menarik masyarakat Taiwan berhubungan secara ekonomi dengan Tiongkok (Roy, 2004). Tiongkok juga telah memberikan kesempatan bagi Taiwan dalam bersaing di pasar Asia dan juga global dengan perkembangan ekonomi Taiwan dinegaranya. Dalam kerugian yang dialami Tiongkok dianggap bukan masalah besar selama Tiongkok berhasil mencapai misi yang mereka harapkan yaitu agenda reformasi Tiongkok (Chen, 2003) .

Dalam penggunaan kemampuan ekonomi Tiongkok memandang bahwa dengan menyediakan yang diinginkan Taiwan dalam proses globalisasi yang ada akan membuat Taiwan tertarik. Tiongkok mengklaim hal ini untuk menciptakan integrasi ekonomi. Serta semakin mendekatkan Taiwan dengan Tiongkok tanpa menggunakan kekerasan (Jianwei, Hu Jintao's " New Thinking " on Cross-Strait Relations, 2007). Sehingga dalam starteginya untuk mengembangkan ekonomi yang paling dominan dapat dilihat dalam kebijakan lintas selat *The Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)*.

ECFA adalah agenda besar kerja sama ekonomi Tiongkok dengan Taiwan yang disepakati pada 21 juni 2010, dalam analisis keuntungan dalam kesempatan ini Tiongkok dirasa tidak menerima timbal balik keuntungan yang sesuai, melainkan lebih condong kearah keuntungan bagi Taiwan. Tiongkok bersedia menurunkan tarif impor untuk 539 barang Taiwan sedangkan barang Tiongkok hanya 267 yang

diturunkan oleh Taiwan. Ketidak seimbangan keuntungan juga dapat dilihat dengan membandingkan angka pendapatan yaitu USD 13,838 juta yang didapatkan Taiwan dan USD 2,858 juta untuk Tiongkok. Maka dari itu perjanjian ini dirasa dibentuk untuk memanjakan Taiwan, jika dilihat lebih jauh dalam kekuatan ekonomi Tiongkok jauh lebih unggul dan harusnya Tiongkok lebih baik dalam mendiplomasikan keuntungan, namun dikatakan ada tujuan integrasi ekonomi Tiongkok didalamnya sehingga banyak yang memandang resiko sudah diprediksikan oleh Tiongkok yang terpenting prinsip satu Tiongkok dapat tercapai (Putro, 2010).

Pada ECFA Tiongkok menerapkan tarif 15-20% untuk barang Taiwan. Namun dalam hal ini Taiwan dianggap diskriminatif dengan melakukan batasan impor dari Tiongkok dengan alasan keamanan dan kedaulatan. Bisa di katakana bahwa. Hal ini timpang mengingat Tiongkok telah membuka ekonomi yang besar untuk Taiwan walaupun keduanya memiliki kesepakatan bersama untuk mengurangi tarif sampai 0 persen (Widarsa, 2011). Untuk keberlangsungan lebih jauh komite kerja sama ekonomi lintas selat melakukan pertemuan pada february 2011, untuk mengembangkan enam kelompok kerja sama seperti industri, perdagangan jasa, investasi dan lain-lain (Min Hua Chiang, 2013).

Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa Tiongkok mulai melihat kebijakan melanjutkan kerja sama ekonomi antar selat adalah suatu kebijakan yang memiliki peluang yang baik untuk mencapai prinsip satu Tiongkok. Selain itu kebijakan ini juga merupakan langkah baru yang dirasa difokuskan pada 2010

atas pertimbangan keuntungan dan pencapaian yang lebih mudah mengingat usaha sebelumnya tidak membuahkan hasil.

2.2.2. Melanjutkan Operasi Militer

Pada tahun 1996 Tiongkok dan Taiwan pernah melakukan perang militer, dengan adanya pengiriman rudal oleh Tiongkok pada tahun tersebut, tindakan militer antara keduanya mengalami pasang surut (China Power, 2016). Adapun kebijakan militer yang pernah dilakukan Tiongkok adalah memblokir angkatan laut dan udara, serangan siber, dan rudal (Fish, 2017). Dalam melihat tindakan militer Tiongkok maka harus melihat kapasitas militer apa saja yang disediakan Tiongkok dalam masalahnya dengan Taiwan, dalam buku putih yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok pada 2002 pemerintahnya akan meningkatkan kapasitas militer atas keseriusannya dalam masalah Taiwan yaitu dengan memproduksi secara mandiri sistem senjata serta pembelian dari negara lain. Anggaran militer Tiongkok adalah 121,29 miliar yuan pada tahun 2000, Yang terus membludak pada 2006 menjadi 283 miliar yuan anggaran ini salah satu yang terbesar di dunia bersanding dengan AS dan Inggris (State Council Information Office People's Republic of China, 2006).

Dalam melihat kasus ini yang paling diperhatikan oleh Tiongkok adalah armada laut, maka dari itu dalam kurun waktu sebelum 2010. Tiongkok membeli kapal selam jenis *destroyer* dan *frigate* selain itu Tiongkok juga membeli jet tempur sebagai alat untuk menyerang di udara yang didapatnya dari Rusia yang terus dibeli dalam kurun waktu 2000-2007 dana yang dihabiskan Tiongkok untuk ini adalah USD 17 miliar. Pada 2007 Tiongkok melakukan uji coba misil balistik

yang berkisar 900 misil dengan jenis *Short range ballistic missile* (SRBM) yaitu DF-15 dan DF-11 yang diarahkan menuju Taiwan dan menjangkau semua wilayah tersebut dengan sangat tepat. Selain itu kekuatan militer lain yang disiapkan Tiongkok adalah jet tempur yang ditempatkan di pangkalan udara Nanjing dan Guangzhou dan kapal selam didekat pangkalan militer Taiwan (Prasetya, 2012).

Dalam prospek pengembangannya Tiongkok selalu menaikkan anggaran persenjataanya dalam hitungan dua digit dari pengeluaran sebelumnya. Jika diperhatikan pada tahun 2007 ke atas Rusia adalah mitra perdagangan militer paling sering berkaitan dengan Tiongkok. Perlengkapan militer ini dibeli oleh Tiongkok karena ingin menjaga kekuatan di wilayah Asia sekaligus terkait dengan masalah Taiwan, adapun senjata-senjata yang dibeli adalah sebagai berikut (Satris, 2015)

Tabel 2.2 Senjata Yang Dibeli Tiongkok Dari Rusia

Pesawat tempur Su-30 dan Su-27
Misil Udara (Air to Air Missiles/AaMs)AA-12
3M-54E (SS-N-27B) ASCMs
Kapal Selam- KILO
Kapal Selam Penghancur kelas II Soveremenny
Pesawat Tempur Transport II 76 /II 78
Sistem penggabungan Senjata

Sumber : (Satris, 2015)

Hubungan kerja sama dalam militer antara Rusia dengan Tiongkok disahkan dalam penandatanganan kerja sama persahabatan pada 2001, Rusia mengatakan mendukung klaim Tiongkok atas Taiwan dan Tiongkok mendukung aksi militer Rusia di Moskow (Haas, 2013). Hubungan keduanya terjalin sudah sedari lama salah satunya adalah adanya KTT Rusia-Tiongkok 1996 di mana keduanya saling mendukung untuk kepentingan masing-masing surat kabar resmi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Rusia mengatakan “*China understands Russia’s position aimed against the expanding of NATO eastward, at the same time Russia confirmed its solidarity with the Chinese stand on Tibet and Taiwan problem* “. Maka dari itu Rusia dikatakan mendukung kepentingan Tiongkok terhadap Taiwan (Trough, 1999).

Selain itu potensi pengembangan kekuatan militer yang utama atas masalah Taiwan oleh Tiongkok berkaitan dengan *People’s Liberation Army (PLA)*, *The PLA Navy (PLAN)* dan *Air Force (PLAAF)* yang dapat menjadi salah satu skenario untuk memblokir yang disediakan di dekat selat Taiwan. Dalam usaha yang lebih ekstrim peluncuran langsung radar yang ditargetkan pada fasilitas keamanan Taiwan yaitu situs radar, pangkalan angkatan laut, dan lapangan terbang (Cole, 2019). PLA Tiongkok dikembangkan menjadi 2,3 juta yang dinyatakan salah satu dari jumlah PLA terbesar di dunia (Wang V. W., 2007). Strategi lain Tiongkok dalam militernya untuk Taiwan adalah strategi blokade pulau yaitu 103 blokade sehingga negara lain tidak mudah untuk masuk kedalam masalah kedua wilayah tersebut, blokade laut yang direncanakan dengan menyerang palabuhan utama Taiwan, menenggelamkan kapal dan memasang

ranjau sehingga menghancurkan pelabuhan, memberikan tekanan pada Taiwan dan membuat negara lain kehilangan akses untuk membantu Taiwan (Lanoaszka, 2018).

Namun dari hal ini penulis ingin menekankan bahwa militer merupakan alternatif tetapi tidak pada tahun 2010 pasca masa perang keduanya. Walaupun Tiongkok memiliki jalan yang terbuka untuk melakukan usaha dijalur militer sampai memaksa Taiwan untuk mengambil sikap defensif murni. Walaupun saat ini Taiwan mengklaim negaranya cukup memiliki sumber daya serta strategi untuk melawan Tiongkok (Cole, 2019). Taiwan percaya mereka memiliki aliansi yang kuat dengan pemerintahan AS, dukungan negara *super power* ini dapat dilihat dari penandatanganan UU perjalanan AS-Taiwan yang kemudian mendorong kunjungan antar keduanya. *Huang National University Chengchi* mengatakan bahwa hal ini kemudian mendorong Taiwan dalam peningkatan agresivitasnya terhadap Tiongkok (Wong, 2018).

Banyak yang mengatakan bahwa Tiongkok akan menyerang Taiwan pada 2020 walaupun Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan. Kemudian dikatakan bahwa hanya ada kemungkinan 50% Tiongkok menyerang Taiwan saat ini, karena Tiongkok memahami akan kerugian yang akan diambil Tiongkok untuk membangun kembali Taiwan. Maka dari itu kebijakan ekonomi dirasa adalah bentuk pemikiran Tiongkok yang dikatakan menteri pertahanan Taiwan sebagai cara untuk membeli Taiwan dari pada mengambilnya secara paksa (Ding, 2017). Namun Tiongkok tetap dalam usaha militernya yaitu sebagian besar menempatkan militernya berdekatan dengan pulau Taiwan seperti kapal,

pesawat terbang, kapal pendaratan untuk mengangkut pasukan serbu dan sistem persenjataan seperti rudal, Namun tindakan militer Tiongkok terhadap Taiwan tidak digunakan pada saat 2010 (American Institute in Taiwan, 1979).

Salah satu legitimasi Tiongkok menghentikan tindakan militer adalah di ranah internasional selama ini barat memiliki pandangan buruk terhadap Tiongkok sebagai negara yang menggunakan ancaman dan kekerasan untuk masalah Taiwan. Tiongkok kemudian memiliki suatu ideologi *China's peaceful rise*, masalah Taiwan adalah masalah yang disoroti bahwa Tiongkok adalah negara yang tidak damai. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan utama Tiongkok di ranah internasional yaitu menjadi kekuatan dunia, yang kemudian mendorong Tiongkok untuk menghentikan kekuatan tradisional yaitu militer (Jianwei, Hu Jintao's "New Thingking" on Cross-Strait Relations, 2007). Hu Jintao mengatakan bahwa "*we can ensure there is no war*" pada saat bertemu dengan Wu Poh Hsiung dan menekankan persaudaraan antara kedua selat dan harus terjalin dengan baik (France24, 2008). Hu menambahkan "*We have achieved a major transition in the relations between the two sides of the Taiwan Straits, with direct and two-way links of mail service, transport and trade fully established, and the Economic Cooperation Framework Agreement between them has been signed for implementation. All this has promoted extensive mutual contacts and ushered in a new stage of peaceful growth of cross-Straits relations*" yang dapat kita pahami bahwa Tiongkok memilih kebijakan ekonomi lintas selat (Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, 2012).

Bagi media barat Tiongkok adalah negara yang paling enggan untuk tidak menggunakan kekuatan militer, yang kemudian memunculkan pertimbangan Tiongkok bahwa harus ada kredibilitas untuk lebih mendukung teori *China's peaceful rise* negaranya dengan pembuktian salah satunya dalam masalah Taiwan. Beberapa tahun kebelakang Tiongkok mulai melihat Taiwan sebagai bagian dari misi damai Tiongkok dengan komponen perdamaian internasional, keamanan internal dan rekonsiliasi Taiwan. Sehingga agenda hubungan antar selat tidak terlepas dari promosi kerja sama damai dan Tiongkok sejauh ini dirasa semakin paham akan penilaian internasional terhadap negaranya (People.com.cn, 2005).

Dari penjelasan terkait dengan operasi militer kita dapat melihat bahwa sebelum 2010 Tiongkok telah melakukan banyak upaya dalam bidang tersebut, namun tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan tujuan negaranya. Sehingga pada kurun waktu tersebut dilakukan berbagai pengembangan militer sebagai sarana yang sama dalam usaha penyatuan wilayah. Sehingga efektifitas dari alternatif ini bisa dipertanyakan mengingat tidak ada perubahan dan dana yang dikeluarkan terus meningkat.

Maka dari itu dalam permasalahan prinsip satu Tiongkok kedua alternatif antara tindakan militer dengan kerja sama ekonomi tidak dapat dipisahkan dari gambaran usaha Tiongkok yang dianalisis pada pertimbangan alternatif priode sebelum 2010. Namun mengapa kemudian penulis merasa bahwa tindakan militer adalah alternatif yang tidak dipilih dalam isu ini. Karena jika dilihat secara mendalam Tiongkok memiliki pilihan untuk terus menggunakan tindakan militer

sebagai alternatif utamanya, namun tidak digunakan. Dalam memahami lebih jauh mengapa alternatif ekonomi dipilih maka akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.

